

DINAS SOSIAL



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP) 2024

Disusun Oleh :  
**Subag Perencanaan dan  
Pelaporan**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan karena kekuasaan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) Dinas Sosial Kabupaten Gowa ini dengan baik dan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. Penyusunan laporan ini merupakan amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah. Pada penilaian sistem akuntabilitas instansi kinerja pemerintah salah satu poin penting adalah Laporan kinerja yang menggambarkan capaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2024 dapat direalisasikan.

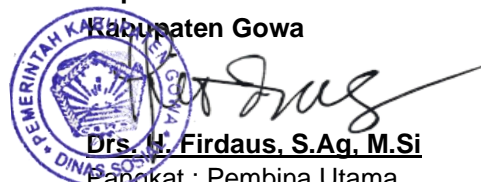
Laporan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun ke belakang, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan kajian dalam melaksanakan program kegiatan yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sungguminasa, 21 Januari 2025

**Kepala Dinas Sosial**

**Kabupaten Gowa**

The image shows a circular official stamp of the Social Services Office of Gowa Regency. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN GOWA' and 'DINAS SOSIAL'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

**Drs. H. Firdaus, S.Ag, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama

Muda/IV.c

NIP. 19710628 199303 1 012

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
BAB IV PENUTUP .....	33

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan kinerja instansi pemerintahan merupakan salah satu alat penting dalam pengelolaan dan evaluasi kinerja organisasi publik. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban kepada masyarakat, tetapi juga sebagai pedoman untuk perbaikan dan pengembangan kinerja di masa yang akan datang. Dalam konteks pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel, laporan kinerja menjadi sangat krusial untuk menunjukkan sejauh mana instansi dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini biasanya mencakup berbagai aspek, seperti pencapaian program, penggunaan anggaran, serta dampak dari kebijakan yang diterapkan. Laporan ini juga menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan kritik konstruktif yang dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui penyusunan laporan kinerja yang sistematis dan terukur, diharapkan instansi pemerintahan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, laporan kinerja bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian integral dari proses manajemen yang berorientasi pada hasil dan kepuasan masyarakat.

Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diatur oleh beberapa peraturan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014. Proses penyusunan LAKIP meliputi langkah-langkah seperti membentuk tim kerja, mengumpulkan data, dan menyusun laporan dengan sistematika tertentu: pendahuluan, rencana strategis, akuntabilitas kinerja, dan penutup.

Penyusunan laporan kinerja ini sejalan dengan visi Kabupaten Gowa **“Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”**. Pembuatan laporan kinerja ini menekankan pada tata kelola pemerintahan terbaik yang tentu saja menunjang kinerja utama.

Dinas Sosial mempunyai tugas utama melaksanakan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Sasaran Kinerja Utama Dinas Sosial adalah **“Menurunkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”**. Pencapaian sasaran kinerja utama tersebut tentu saja harus ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

#### **B. Latar Belakang**

Pada peraturan daerah kabupaten gowa nomor **88** tahun **2021** tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial. Dinas Sosial terbagi dalam 4 bidang dan 1 sekretariat, termasuk didalamnya adalah kepala dinas, sekretaris. Dinas sosial, ini memiliki beberapa sdm untuk dapat

menunjang tugas dan fungsinya yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang pns dan memiliki tenaga tambahan berupa 45 (empat puluh lima) orang tenaga pekerja sosial yang tersebar ke seluruh bidang.

**a) Tugas Dan Fungsi**

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

- (1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan] pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial;
- pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial;
- pelaksanaan administrasi pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

#### 4. Bidang Pemberdayaan Sosial

(1) Bidang Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh kepala bidang, yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas tugas merencanakan operasionalisasi penyelenggaraan tugasnya terkait dengan pemberdayaan sosial meliputi Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan/Kejuangan sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Sosial;
- pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan Sosial;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Sosial;
- pelaksanaan administrasi Pemberdayaan Sosial; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

#### 5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

(1) Bidang Perlindungan Sosial dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas membantu kepala Dinas Sosial dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan Sosial meliputi Advokasi dan Perlindungan Sosial sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi:
- perumusan kebijakan teknis bidang Perlindungan Sosial;
  - pelaksanaan kebijakan teknis Perlindungan Sosial;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perlindungan Sosiald. pelaksanaan administrasi Perlindungan Sosial; dan
  - pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas tugas merencanakan operasionalisasi penyelenggaraan tugasnya terkait yang meliputi pelayanan dan pendataan fakir miskin, pengelolaan bantuan fakir miskin sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan;

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi:

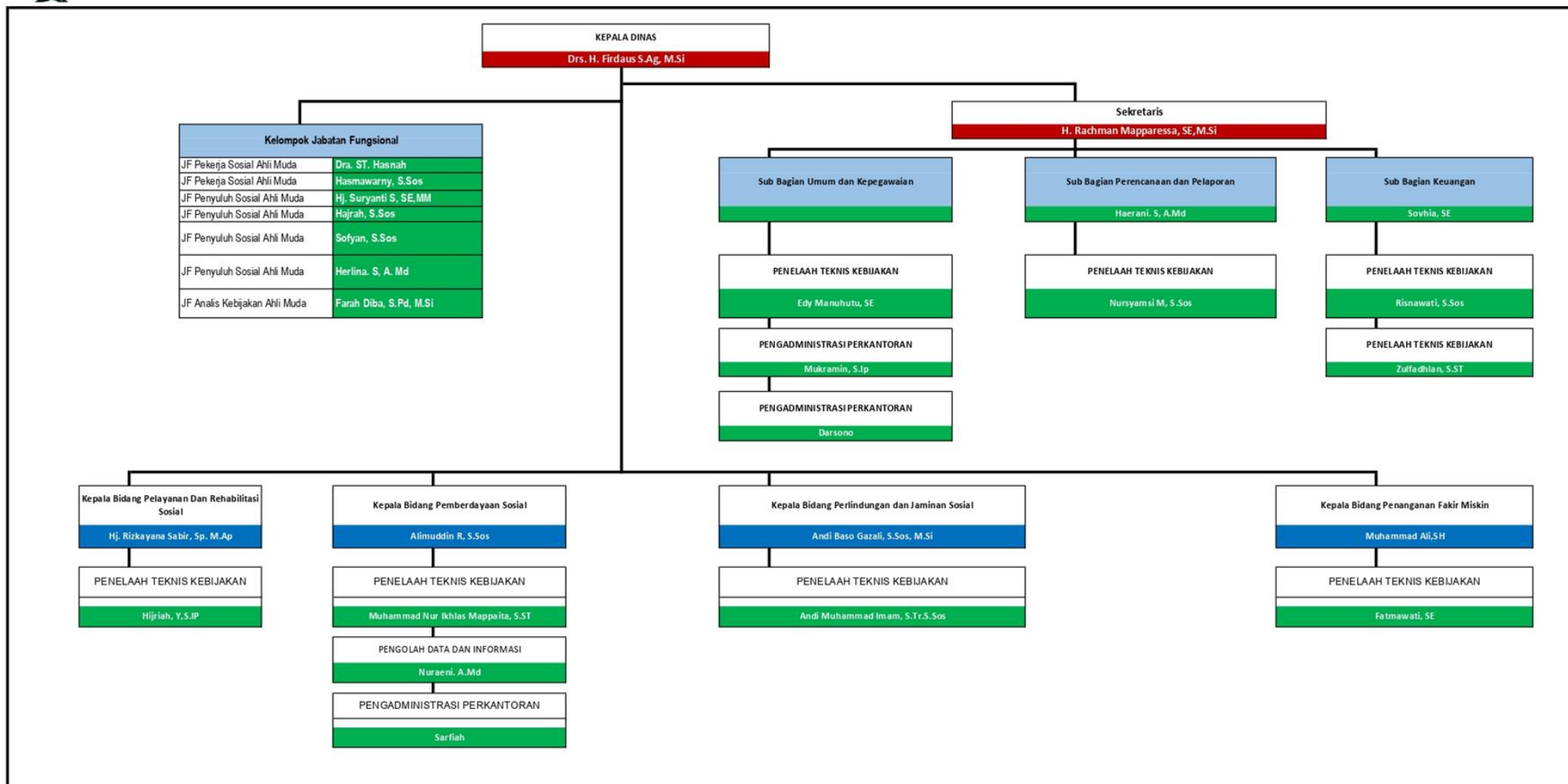
- perumusan kebijakan teknis bidang Penanganan Fakir Miskin;
- pelaksanaan kebijakan teknis Penanganan Fakir Miskin;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penanganan Fakir Miskin;
- pelaksanaan administrasi Penanganan Fakir Miskin; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**b) Struktur organisasi**

Berdasarkan perubahan peraturan bupati nomor 88 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas sosial, berikut ini struktur organisasinya :



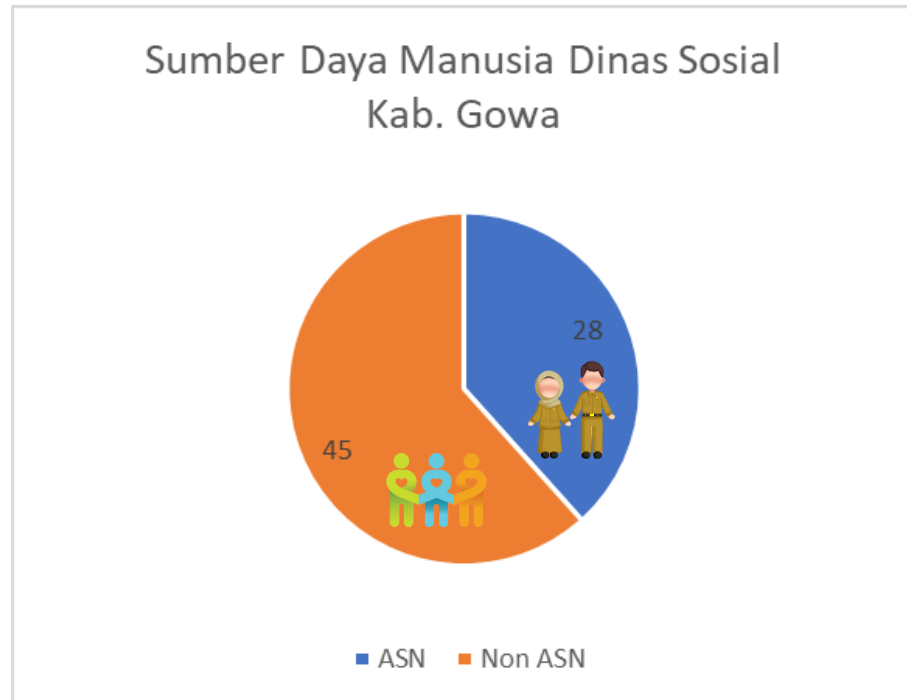
## STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN GOWA



**a) Sumber Daya Manusia**

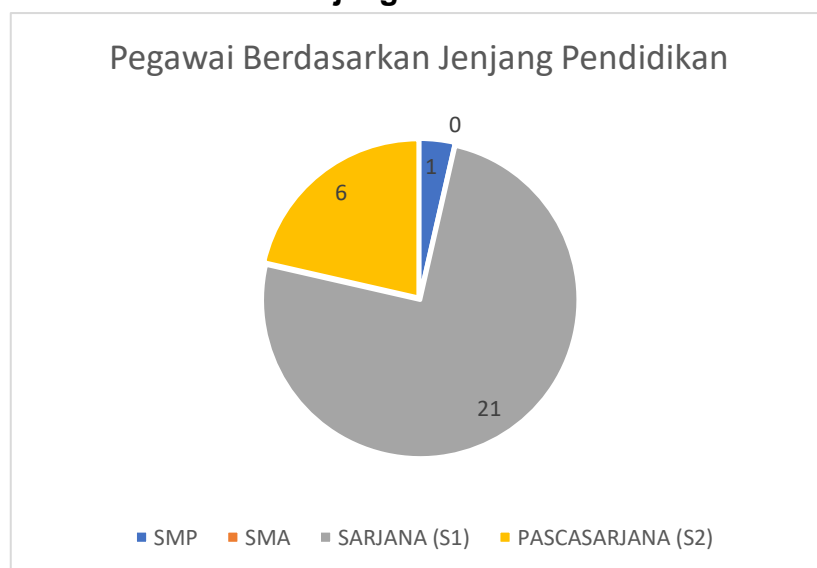
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang mewujudkan suksesnya pencapaian kinerja Dinas Sosial. Jumlah ASN per 31 Desember 2024 sebanyak dua puluh delapan (28) orang dan tenaga non ASN sebanyak empat puluh lima (45) orang.

**Gambar 1.1 Grafik SDM Dinas Sosial**



Berdasarkan tingkat pendidikan maka berikut ini grafik sumber daya manusia (SDM) Dinas Sosial.

**Gambar 1.2 Grafik SDM Dinas Sosial Berdasarkan Jenjang Pendidikan**



### C. ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

Dinas sosial sebagai salah satu pelayanan wajib dasar membuatnya mempunyai peran penting dalam mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Gowa. Menjadi salah satu organisasi perangkat daerah utama yang harus berkinerja dengan baik maka sasaran kinerja utama menjadi tugas pokok yang harus diselesaikan agar permasalahan dapat teratasi. Berikut ini beberapa isu-isu strategis Dinas Sosial yang harus dituntaskan bersama dengan OPD lainnya :

1. **Pengurangan kemiskinan.** Angka kemiskinan Kab. Gowa tahun 2024 sebesar 7,42% kemudian pada tahun 2024 menangani penurunan menjadi 6,85%. Jumlah penduduk miskin per Maret tahun 2024 sebesar 55.130 jiwa dengan Garis Kemiskinan Rp 475.303,00. Kemiskinan menjadi isu strategis di Kab. Gowa karena memberikan dampak yang besar karena dapat mengurangi kesempatan kerja dan pengembangan ekonomi. Berkurangnya angka kemiskinan membuktikan adanya perubahan positif untuk meningkatkan nilai perekonomian sehingga kemiskinan ini tetap menjadi isu strategis Dinas Sosial.
2. **Penanganan keterlantaran.** Orang terlantar adalah individu yang mengalami kesulitan hidup dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemiskinan, ketergantungan zat, penyakit kronis, kehilangan keluarga, bencana alam dan konflik sosial. Keterlantaran menjadi isu penting karena banyaknya orang-orang terlantar yang dibawa ke kantor Dinas Sosial.
3. **Disabilitas.** Perlunya peningkatan aksesibilitas dan inklusi bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial.
4. **Kapasitas SDM.** Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang sosial, termasuk pekerja sosial, pendamping, dan tenaga relawan, untuk memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas.
5. **Teknologi.** Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan sosial, seperti sistem informasi kesejahteraan sosial, basis data terpadu, dan aplikasi mobile, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
6. **Anggaran.** Peningkatan alokasi anggaran untuk program-program sosial, termasuk bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas SDM, untuk mencapai dampak yang lebih besar.

#### **D. STRATEGI ORGANISASI**

Secara sederhana, strategi organisasi adalah rencana komprehensif dan terintegrasi yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Ini melibatkan serangkaian keputusan dan tindakan yang terarah, mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan keberlanjutan.

Pada Dinas Sosial Kab. Gowa untuk meminimalisir permasalahan yang dihadapi hal yang perlu diperkuat dengan memperkuat internal perangkat daerah terlebih dahulu. Dinas sosial memiliki sumber daya manusia yang jumlahnya cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan. Salah satu hal yang penting untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Perwujudan peningkatan kualitas tersebut dengan dilaksanakannya peningkatan kapasitas melalui sosialisasi ataupun bimtek bagi para tenaga ASN maupun non ASN dalam lingkup kerja Dinas Sosial.

Strategi organisasi selanjutnya untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial dengan pelaksanaan kinerja berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial wajib berdasarkan aplikasi pengolah data DTKS dari Kementerian Sosial sebab kualitas data yang tidak perlu diragukan. Kinerja Dinas Sosial berdasarkan data DTKS ini dilaksanakan pada beberapa program kecuali pada program dan kegiatan pemberian bantuan bagi korban bencana.

Strategi terakhir dan merupakan strategi utama dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial adalah aksi cepat tanggap yang dilaksanakan oleh tenaga kerja baik ASN maupun non ASN. Aksi cepat tanggap ini dilaksanakan untuk mewujudkan pelayanan prima pemerintahan bagi masyarakat terkhusus bagi masyarakat yang tergolong dalam pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah proses penting yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya, meningkatkan kinerja individu dan tim, dan menciptakan budaya kinerja yang positif. Dengan perencanaan kinerja yang matang, organisasi dapat memastikan bahwa semua orang bekerja sama untuk mencapai kesuksesan bersama.

#### A. TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan strategis merupakan perencanaan lima tahunan yang dijadikan acuan pembuatan rencana kerja tahunan. Pada bab ini menguraikan perencanaan tahunan . Dinas sosial mengambil andil pada visi kabupaten Gowa yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”** dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Berdasarkan misi di atas Dinas Sosial berkontribusi pada misi ke 2 dengan poin meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sehingga dapat ditentukan sasaran Dinas Sosial yaitu **“Menurunkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”** dengan indikator **“Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”**. Berdasarkan sasaran tersebut berikut ini tabel yang menggambarkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dengan jelas.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun ke -						
					2021	2022	Kondisi Awal	2024	2024	2025	2026
1	MENURUNKAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	MENURUNNYA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	JUMLAH PENURUNAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	Orang			2444	563	580	600	615

Pada tahun 2024 ini terjadi perbaikan pada penentuan indikator kinerja utama (IKU) sehingga target kinerja pun berubah. Perubahan target juga didasarkan pada susahnya perhitungan untuk menemukan nilai yang tepat pada sasaran yang lalu. Perubahan tujuan dan sasaran ini dimuat pada keputusan kepala dinas sosial tentang penetapan indikator kinerja utama di lingkungan dinas

sosial nomor 400.9/38/dinsos pada tanggal 1 April 2024.

Tujuan “**Menurunkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**” ini dipilih karena PPKS merupakan target utama Dinas Sosial yang telah terklasifikasi berdasarkan masalahnya. PPKS terbagi menjadi 26 jenis sehingga klasifikasi untuk menghitung nilainya lebih mudah untuk diketahui. Berdasarkan 26 jenis PPKS itu Dinas Sosial akan lebih mudah menghitung jumlah jiwa yang telah ditangani ataupun difasilitasi. Setelah PPKS ditangani atau difasilitasi maka kita akan lebih mudah mengelompokkannya menjadi dua bagian setelah dibantu ataupun belum dibantu. Perhitungan target kinerja setelah perubahan tujuan dan sasaran menjadi lebih mudah.

## **B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial yaitu “**Menurunkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**” maka telah dijabarkan strategi Dinas Sosial yaitu:

- 1. Peningkatan Kemampuan Ekonomi Keluarga:** Memberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pendampingan bagi keluarga miskin agar memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan.
- 2. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan :** Memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
- 3. Perlindungan Sosial yang Komprehensif:** Memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga sangat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan). Mencegah dan menangani kasus kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak. Memberikan pelayanan rehabilitasi, bantuan alat bantu, dan dukungan sosial bagi penyandang disabilitas. Memberikan pelayanan perawatan, dukungan sosial, dan pensiun bagi lansia.
- 4. Penguatan Kelembagaan:** Meningkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga-lembaga yang menangani masalah kesejahteraan sosial.

Berdasarkan strategi-strategi tersebut lah maka akan terwujud “Satu data valid Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan seluruh kebutuhan dan permasalahannya”.

## **C. INDIKATOR KINERA UTAMA (IKU)**

IKU adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran strategis organisasi. Dalam konteks pemerintahan, IKU digunakan untuk mengukur kinerja berbagai tingkatan, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga unit kerja di bawahnya. Dengan adanya IKU, instansi pemerintah didorong untuk bekerja lebih efisien dan

efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja utama dinas sosial berdasarkan perubahan keputusan kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa No. 400.9/38/DINSOS, berikut ini penetapan dan targetnya:

**Tabel 2.2**  
**Target Kinerja PerTahun**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun ke -				
				Kondisi Awal	2024	2024	2025	2026
1	MENURUNNYA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	JUMLAH PENURUNAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	Orang	2444	563	580	600	615

IKU diatas merupakan IKU Strategis yang terkait dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU pada dinas sosial mengalami perubahan sebanyak dua kali karena adanya perbaikan hasil evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut indikator tidak efektif atau tidak relevan lagi. Kemudian dilakukan diskusi untuk menyesuaikan IKU agar mencapai hasil yang lebih baik.

#### **D. PERJANJIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia. Tujuan Penyusunan PK antara lain :

1. Menjadi dasar penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.
2. Mendorong instansi pemerintah untuk bekerja lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Menjadi dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja merupakan alat yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan penerapan PK yang baik, diharapkan instansi pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif, memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini perjanjian kinerja dan anggaran tahun 2024 :

**Tabel 2.4**

**Perjanjian Kinerja 2024 Dinas....**

**Tujuan : Menurunkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks)	580	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 84.000.000
			Program Rehabilitasi Sosial	Rp 234.292.000
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp 412.629.400
			Program Penanganan Bencana	Rp 133.680.500

Sasaran strategis yakni menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) didukung oleh program pemberdayaan sosial dengan total anggaran Rp 84.000.000, Program Rehabilitasi Sosial dengan total anggaran Rp 234.292.000, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan total anggaran Rp 412.629.400, Program Penanganan Bencana dengan total anggaran Rp 133.680.500.

Terjadi perubahan dalam besaran anggaran setiap program dibandingkan tahun 2024 lalu. Perbedaan jumlah anggaran yang ada ini karena mengikut program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. **Total anggaran untuk “Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” sebesar Rp 864.601.900.**

**Tabel 2.5**  
**Rincian anggaran sasaran strategis**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Rp 864.601.900.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pada Tahun 2024 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial dilakukan revisi pada bulan April 2024. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi Perbaikan indikator kinerja utama menjadi lebih spesifik, realistis, agar dapat diukur dan dapat dicapai. Indikator kinerja utama sebelumnya yaitu “**Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**” diubah menjadi “**Jumlah Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**”. IKU tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penurunan ini dapat menjadi indikator keberhasilan program-program pemerintah dan upaya-upaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

**E. Standar Penilaian Kinerja**

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Sosial ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Standar Penilaian Kinerja**

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

### BAB III

#### CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi.

##### A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2024 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1  
Target dan Realisasi Kinerja  
Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KET
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	580	653	112%	

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, telah ditetapkan target kinerja untuk menurunkan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebanyak 580 orang. Target ini merupakan bagian dari komitmen untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan. Berkat kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak terkait, target penurunan jumlah PPKS telah berhasil tercapai. Bahkan, realisasi capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan, dengan penurunan sebanyak 653 orang. Keberhasilan ini merupakan hasil dari implementasi berbagai program kesejahteraan sosial yang terintegrasi dan komprehensif. Berikut ini rincian program dari keberhasilan tersebut :

- a. **Peningkatan Kesejahteraan (200 jiwa)** karena meningkatnya pendapatan dan stabilitas ekonomi, mereka mampu keluar dari kategori PPKS.
- b. **Pemberian Permakanan (170 jiwa):** Program pemberian permakanan berupa bahan pokok telah membantu memenuhi kebutuhan nutrisi 170 jiwa PPKS yang rentan terhadap kekurangan gizi. Pemenuhan kebutuhan

dasar ini menjadi langkah awal bagi mereka untuk dapat mengakses program-program pemberdayaan lainnya.

- c. **Bantuan Alat Bantu Disabilitas (7 jiwa):** Sebanyak 7 jiwa PPKS yang memiliki disabilitas telah menerima bantuan alat bantu, seperti kursi roda, tongkat, atau alat bantu dengar. Bantuan ini mempermudah mereka beraktivitas sehari-hari dan berpartisipasi lebih aktif dalam masyarakat.
- d. **Bimbingan Fisik Mental dan Spiritual (7 jiwa):** Program bimbingan fisik yang diberikan kepada 7 jiwa PPKS bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran mereka. Dengan kondisi fisik dan mental yang lebih baik, mereka memiliki peluang lebih besar untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik.
- e. **Akses Kesehatan dan Pendidikan (193 jiwa):** Sebanyak 193 jiwa PPKS telah mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Akses ini meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan biaya pengobatan, serta rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa pendidikan (KIP).
- f. **Penelusuran Keluarga (15 jiwa):** Program penelusuran keluarga telah berhasil menemukan dan menghubungkan kembali 15 jiwa PPKS dengan keluarga mereka. Dukungan keluarga memiliki peran penting dalam proses pemulihan dan peningkatan kesejahteraan PPKS.
- g. **Reunifikasi Keluarga (25 jiwa):** Setelah melalui proses penelusuran keluarga, sebanyak 25 jiwa PPKS berhasil direunifikasi dengan keluarga mereka. Reunifikasi ini memberikan mereka lingkungan yang lebih aman dan suportif untuk berkembang.
- h. **Rujukan (36 jiwa):** Sebanyak 36 jiwa PPKS telah dirujuk ke berbagai layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti layanan rehabilitasi sosial, layanan kesehatan mental, atau layanan hukum. Rujukan ini memastikan bahwa mereka mendapatkan penanganan yang tepat dan komprehensif.

## **B. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023**

Pengukuran realisasi kinerja memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek pemerintahan. Pengukuran kinerja memungkinkan kita untuk mengevaluasi apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Dengan membandingkan realisasi dengan target yang diharapkan, kita dapat melihat sejauh mana kinerja kita telah berjalan. Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja**  
**Tahun 2023 dan 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	4674		563	653			-	115%	112%		

Pencapaian target penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan dan melampaui pencapaian tahun sebelumnya. Jika tahun 2023 kita berhasil menurunkan 563 jiwa PPKS, tahun ini kita berhasil mencapai penurunan yang lebih signifikan, yaitu 653 jiwa. Peningkatan sebanyak 90 jiwa ini merupakan bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim yang terlibat dalam program-program kesejahteraan sosial. Hal ini juga menunjukkan bahwa strategi dan pendekatan yang kita lakukan semakin efektif dalam menangani permasalahan PPKS.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan capaian ini antara lain:

1. **Peningkatan Efektivitas Program:** Evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus terhadap program-program kesejahteraan sosial telah meningkatkan efektivitasnya dalam menjangkau dan membantu PPKS.
2. **Sinergi yang Lebih Baik:** Koordinasi dan sinergi antar bidang terkait.
3. **Inovasi Program:** Pengembangan program-program inovatif yang sesuai dengan kebutuhan PPKS, seperti program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pendampingan keluarga, telah memberikan dampak positif yang signifikan.
4. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan masalah PPKS juga semakin meningkat, sehingga partisipasi dan dukungan dari masyarakat juga semakin besar.

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.**

Adapun perbandingan realisasi jangka menengah dengan realisasi kinerja tahun 2023 ini digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja				
			2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	2	3	5	6	7	8	9
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	615	NA	563	653		

Target jangka menengah Renstra untuk penurunan jumlah PPKS adalah 615 jiwa. Namun, berkat kerja keras dan upaya kolektif yang terus-menerus, kita berhasil mencapai penurunan sebanyak 653 jiwa pada tahun 2024. Ini berarti kita telah melampaui target Renstra sebesar 38 jiwa, sebuah pencapaian yang luar biasa. Pencapaian ini memiliki makna yang sangat penting. Ini menunjukkan bahwa program-program kesejahteraan sosial yang kita laksanakan tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak jangka menengah yang signifikan. Hal ini juga membuktikan bahwa strategi dan pendekatan yang kita gunakan sudah tepat dan memberikan hasil yang berkelanjutan.

**D. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial merupakan acuan penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, PMKS adalah perseorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial, atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

SPM melalui Permensos No.9 Tahun 2018 telah menjadi dasar untuk melaksanakan kerja-kerja sosial dalam melayani PPKS sehingga keduanya tetap berhubungan.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
			2024	Target	Realisasi
				2024	2024
1	2	2	4	5	6
	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	653	--	--

SPM Bidang Sosial mencakup berbagai jenis pelayanan dasar, antara lain:

- **Pelayanan sosial dasar bagi anak terlantar:** Meliputi perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya dan telah terlayani 276 jiwa.
- **Pelayanan sosial dasar bagi lanjut usia terlantar:** Meliputi perawatan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kegiatan sosial, telah terlayani jiwa 94 jiwa.
- **Pelayanan sosial dasar bagi penyandang disabilitas:** Meliputi rehabilitasi, pelatihan keterampilan, dan bantuan alat bantu. Telah terlayani 22 jiwa.
- **Pelayanan sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis:** Meliputi identifikasi, pembinaan, dan penyaluran ke tempat yang layak sehingga telah terlayani 61 jiwa.
- **Pelayanan sosial dasar bagi korban bencana alam:** Meliputi bantuan tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan psikososial. Telah terlayani 441 jiwa.

#### **E. Analisis Penyebab Keberhasilan**

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2024 disimpulkan mendapatkan keberhasilan karena melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika tahun 2023 kita berhasil menurunkan 563 jiwa PPKS, tahun ini kita berhasil mencapai penurunan yang lebih signifikan, yaitu 653 jiwa. Peningkatan sebanyak 90 jiwa ini merupakan bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim yang terlibat dalam program-program kesejahteraan sosial. Hal ini juga menunjukkan bahwa strategi dan pendekatan yang kita lakukan semakin efektif dalam menangani permasalahan PPKS karena capaian yang diperoleh sebesar 112%.

Beberapa hal yang menjadi poin penting pada keberhasilan penurunan PMKS sebesar 653 jiwa ini karena :

1. Keberhasilan ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.
2. Sinergi antara program-program pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci keberhasilan penurunan PMKS.
3. Program perlindungan dan jaminan sosial memberikan bantuan kepada PMKS untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Program rehabilitasi sosial membantu PMKS untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial mereka.

5. Program pemberdayaan sosial memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada PMKS agar mereka dapat mandiri secara ekonomi.

#### F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Dalam konteks pemerintahan, sumber daya dapat berupa anggaran, tenaga kerja, waktu, material, dan informasi. Efisiensi ini penting karena memungkinkan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah.

**Tabel 3.5**

**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			Efisiensi %
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	580	653	112%	Rp 5.319.338.072	Rp 4.996.397.274	94%	18%

Pada tahun 2024 Anggaran Dinas Sosial mencapai Rp 5.319.338.072 kemudian yang terealisasi sebesar Rp 4.996.397.274 yang artinya 94% anggaran terserap untuk memenuhi indikator kinerja Jumlah Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Besaran capaian anggaran tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja berarti memperoleh nilai efisiensi sebesar 18%. Efisiensi dalam konteks anggaran berarti mencapai hasil yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal.

#### G. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja (perjanjian kinerja)

Setiap rupiah yang dialokasikan dalam anggaran memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan efektif akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat atau organisasi. Sebaliknya, program dan kegiatan yang tidak efektif akan menghamburkan anggaran tanpa memberikan manfaat yang berarti.

Besarnya capaian kinerja Dinas Sosial 112% yang memperoleh 18%

efisiensi anggaran dapat dilihat melalui program dan kegiatan yang telah terlaksana. Berikut ini tabel yang menggambarkan keberhasilan pencapaian kinerja :

**Tabel 3.6**

**Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rencana Tindak Lanjut
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	112%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi	13%	22%	169%	
				Persentase PPKS yang memperoleh bantuan pangan	9%	9%	100%	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh Jaminan Sosial	13%	15%	115%	
				Persentase Data PPKS yang terdaftar dalam data DTKS	15%	19,6%	130%	

Berdasarkan tabel diatas terdapat kolaborasi dua program yang memberikan dampak positif peningkatan kinerja dalam penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Program yang berkontribusi yaitu Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial selain itu terdapat Program Penanganan Bencana yang juga memberikan kinerja positif pada peningkatan nilai standar pelayanan minimal (SPM).

Program pelayanan rehabilitasi sosial di Dinas Sosial adalah upaya untuk mengembalikan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat berfungsi kembali secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial telah dilayani 7 orang, bimbingan sosial kepada keluarga dilayani 126 keluarga, 19 orang mendapatkan fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak. 193 Jiwa dilayani untuk diberikan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, 15 orang memenuhi penelusuran keluarga, 25 mendapatkan reunifikasi sosial, serta 36 orang memperoleh rujukan. Fokus bidang pelayanan

dan rehabilitasi sosial memang mengembalikan kemampuan individu untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

Pada program perlindungan dan jaminan sosial mengurangi risiko sosial ekonomi yang mungkin dihadapi individu atau kelompok masyarakat. Tujuannya adalah memberikan rasa aman dan kepastian dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Pada tahun 2024 terdapat 288 jiwa PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial berupa akses pembuatan NIK sebanyak 19 orang, akses layanan kesehatan dan pendidikan berupa rekomendasi KIS dan KIP 193 orang, penelusuran keluarga 15 orang, 25 keterlantaran yang direunifikasi, dan 36 PPKS yang harus dirujuk. Semua pelayanan tersebut masuk pada kategori pemenuhan jaminan sosial para PPKS.

Program dan perlindungan jaminan sosial juga ada yang bersifat preventif dan jangka panjang. Program ini seperti bantuan program keluarga harapan dan program bantuan non tunai “Sembako”. Program perlindungan dan jaminan sosial bertujuan untuk:

- Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Memberikan perlindungan kepada kelompok rentan
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif

Tujuan-tujuan yang telah dicapai tersebut diharapkan akan membawa dampak positif bagi penurunan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Seperti halnya yang terjadi di tahun 2024, 200 jiwa PPKS telah keluar dari data terpadu kesejahteraan sosial. Keluarnya mereka biasa disebut istilah “*graduasi*”. Mereka yang keluar dari DTKS dianggap telah sejahtera dari segi ekonomi dan di “*graduasi*” melalui proses muswaraha kelurahan. Jika tahun 2024 200 jiwa telah keluar maka ditahun berikutnya jumlah graduasi akan selalu bertambah dan tentu saja tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa semakin menurun.

**Kumpulan Gambar**  
**Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial oleh**  
**Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (PRS)**



Gambar 3.1  
Dokumentasi Penyaluran Bahan Pangan Untuk Orang Terlantar



Gambar 3.2  
Razia Gelandangan dan Pengemis



Gambar 3.3

Pemberian Bimbingan Sosial Pada Keluarga Gepeng, Terlantar



Gambar 3.4

Fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan orang-orang terlantar



Gambar 3.5  
Penelusuran keluarga Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis





Gambar 3.6  
Pendampingan akses ke layanan kesehatan dasar bagi orang  
terlantar



Gambar 3.7  
Pendampingan AMPK yang dirujuk ke sentra gau mabbaji

## H. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2024 sebesar 94% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7**

**Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2024**

No.	Uraian	Jumlah		%
		Anggaran	Realisasi	
<b>Sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>				
	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Rp84.000.000</b>	<b>Rp82.000.000</b>	<b>97%</b>
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp84.000.000	Rp82.000.000	97 %
	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Rp234.292.000</b>	<b>Rp228.380.000</b>	<b>97%</b>
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp234.292.000	Rp228.380.000	97%
	<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>	<b>Rp412.629.400</b>	<b>Rp385.244.400</b>	<b>93%</b>
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp412.629.400	Rp385.244.400	<b>93%</b>
	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Rp133.680.500</b>	<b>Rp121.204.980</b>	<b>90%</b>
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp89.668.500	Rp88.648.500	<b>99%</b>
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp44.012.000	Rp 32.556.480	<b>74%</b>
	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Rp4.308.898.172</b>	<b>Rp 4.034.712.894</b>	<b>93%</b>
	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>Rp145.838.000</b>	<b>Rp144.855.000</b>	<b>99%</b>

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial telah berhasil mencapai kinerja yang sangat baik dalam upaya menurunkan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Target Indikator Kinerja “**Jumlah Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial**” sebanyak 580 jiwa telah terlampaui dengan mencapai 653 jiwa atau 112% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan sumberdaya yang memadai. Realisasi anggaran sebesar 94% menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah mampu mengelola anggaran secara efisien dan efektif untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

#### B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial yang telah berhasil mencapai target penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial:

- a. Melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan mencapai target.
- b. Mengevaluasi efektivitas masing-masing program yang telah dilaksanakan.
- c. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan yang relevan.